

**THE IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OF FAMILY HOPE
PROGRAM IN SERANGGAM VILLAGE, SELKAU TIMUR SUB-DISTRICT,
SAMBAS REGENCY**

By:

MEYLING^{1*}

NIM : E1011151168

Rusdiono², Tri Hutomo²

*Email: e1011151168@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University

ABSTRACT

This research aimed to describe and analyze the process of factors that influenced the supervision process of Family Hope Program (PKH) in Seranggam Village, Selkau Timur Sub-District, Sambas Regency. This research was based on the problem of off target distribution of PKH funds and the data validity. The research method was a qualitative approach with descriptive research type. This research used the theory of supervision according to Sagian (2008-112) which consisted of 1) direct supervision. In monitoring the distribution and validity of the data, it was not adjusted to the category or target of Family Hope program and not in accordance with the terms and conditions stated in the Permesos (Minister of Social Affairs Regulation) Number 1 of 2018 concerning Family Hope program article 3 that the target of PKH is a family and/or a poor person, has the components of health, education and social welfare; 2) indirect supervision, there was an indirect supervision process between PKH assistants and the Social Office, but the process was social media in the form of WhatsApp Groups with the Social Office. In this research, it was suggested that the supervision should be optimized to be more effective and thorough and it should be conducted more selectively. Furthermore, the information and communication system to subordinates should be improved (sub-district PKH assistants) and beneficiaries in order to further increase the obligations of PKH program activities and optimize the role as beneficiaries in developing aid funds so as not to become an addiction to recipients, especially as self-awareness in order to achieve family hope program.

Keywords: Supervision of Family Hope Program (PKH), On Target

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA SERANGGAM
KECAMATAN SELAKAU TIMUR
KABUPATEN SAMBAS**

Oleh:

MEYLING^{1*}

NIM : E1011151168

Dr. H. Rusdiono, M.Si², Drs. Tri Hutomo, M.Si²

*Email: e1011151168@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengawasan pada program keluarga harapan (PKH) di desa seranggam kecamatan selakau timur kabupaten sambas. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan kurang tepat sasaran dalam penyaluran dana PKH dan kevalidan data. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan menurut Sagian (2008-112) yang terdiri dari 1) pengawasan langsung. Dalam pengawasan penyaluran dan kevalidan data tidak disesuaikan dengan kategori maupun sasaran program keluarga harapan, tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditertera dalam permesos 1 Tahun 2018 Tentang program keluarga harapan pasal 3 bahwa sasaran PKH merupakan keluarga dan atau seseorang miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial; 2) pengawasan tidak langsung, Adanya proses pengawasan tidak langsung pendamping PKH dengan Dinas Sosial, namun proses tersebut berbentuk sosial media yaitu berbentuk Grup WhatsApp dengan dinas sosial. Saran dalam penelitian ini yaitu lebih efektif dan teliti dalam upaya mengoptimalkan pengawasan, lebih selektif untuk melakukan pengawasan, meningkatkan sistem informasi dan sistem komunikasi kepada bawahan pendamping PKH kecamatan dan penerima manfaat agar lebih meningkatkan kewajiban-kewajiban kegiatan program PKH dan mengoptimalkan peran sebagai penerima manfaat dalam mengembangkan dana bantuan agar tidak menjadi candu terhadap penerima khususnya kesadaran diri sendiri agar tercapainya program keluarga harapan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Di berbagai Negara, Pemerintah selalu memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin. Perlindungan sosial menjadi kegiatan yang sangat penting dilakukan sekaligus untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin, tidak hanya terjadi pada masyarakat miskin saja, tetapi juga pada beberapa Negara berkembang dan bahkan Negara maju.

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), istilah perlindungan sosial mencakup jaminan sosial yang sangat erat kaitannya dengan program pengentasan kemiskinan, dan menjamin akses pada pelayanan kesehatan melalui inisiatif yang berbasis publik, perorangan atau masyarakat. Untuk memberikan keabsyahan sistem perlindungan sosial di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya

dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perlindungan sosial yang termuat dalam rencana pembangunan nasional merupakan suatu langkah kebijakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, terutama kelompok masyarakat yang paling miskin dan kelompok masyarakat miskin.

Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara Internasional dikenal sebagai program *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Salah satu program yang merupakan kebijakan perlindungan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut sebagai bentuk pembelajaran kepada masyarakat miskin agar dapat lebih disiplin dalam mengelola

bantuan agar dirasakan menjadi lebih bermanfaat dan bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. PKH memberikan kontribusi dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan *Millenium Develepment Goals* (MDGs), yang terdiri dari pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta pengurangan kematian ibu melahirkan.

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Ditegaskan dalam

Permensos 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3. Bahwa Sasaran PKH yaitu: Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Tujuan Program Keluarga Harapan saat ini mengacu pada Permensos 1 Tahun tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 yaitu: PKH bertujuan :

- 1) untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- 2) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- 3) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- 4) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan

5) mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Kriteria keluarga penerima PKH pada Permensos 1 Tahun tentang Program Keluarga Harapan Pasal 5 yaitu:

- 1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi : ibu hamil/menyusui; dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: anak sekolah dasar madrasah ibtidaiyah atau sederajat; anak sekolah menengah pertama madrasah tsanawiyah atau sederajat; anak sekolah menengah atas madrasah aliyah atau sederajat; dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- 3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan penyandang disabilitas

diutamakan penyandang disabilitas berat.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Ada beberapa fungsi manajemen yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Perencanaan dibutuhkan untuk memberikan arah kepada organisasi guna menetapkan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian dibutuhkan untuk dapat merancang bentuk organisasi yang sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja. Dan pengawasan dibutuhkan untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi sudah sesuai dengan rencana atau belum.

Pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Fungsi manajemen tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan. Pengawasan merupakan cara untuk menjamin bahwa rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan yang menunjukkan

proses pengawasan adanya proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) didalam observasi saya pada tahun 2020 saya mendapatkan informasi berupa data grafik sosial desa seranggam ditemukan data yang kurang valid karena dalam data tersebut masih sama dengan data tahun sebelumnya.

Melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Di desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas.”

2. Identifikasi Masalah Penelitian

- 1) Kurang tepatnya dalam penyaluran penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
- 2) Laporan yang tidak akurat atas proses peyaluran PKH
- 3) Turun lapangan dan pelaksanaan pengurusan yang jarang dilakukan

3. Fokus Penelitian

mengenai proses yang mempengaruhi pengawasan program keluarga harapan di Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas.

4. Rumusan Masalah

Bagaimana proses pengawasan Dinas Sosial terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Seranggam?

5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, peneliti menetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1) untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Seranggam.
- 2) Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penyaluran dana PKH.

6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh, manfaat yang pertama adalah manfaat teoritis, manfaat ini dimaksudkan sebagai langkah pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teori, sedangkan manfaat yang kedua adalah manfaat praktis, yaitu pemecahan permasalahan secara nyata.

1) **Manfaat teoritis**

Sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya manajemen publik dalam aspek pengawasan terhadap keluarga penerima PKH.

2) **mafaat praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam upaya mengukur keberhasilan pendamping sosial dalam program Keluarga harapan (PKH)
2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terkait aktivitas pengawasan terhadap penerima PKH.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori

a. Manajemen

Handoko (2011:8) Manajemen mengatakan bahwa bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan,

pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan dan pengawasan. Sedangkan Hasbuan (2012:1), bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaat sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Maka dapat dilihat bahwa manajemen merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang proses mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

b. Manajemen Publik

Menurut overman (dalam keban, 2004:85) mengatakan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling disatu sisi sedangkan disisi lain adalah SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan sebuah kinerja komplek dari aktornya yaitu pemerintah dan seluruh pegawainya untuk melayani publik dengan sebaik-baiknya dan publik merasa terpenuhi semua keinginannya dengan kinerja atau

pengaturan dari dalam organisasi publik itu sendiri.

c. Pengawasan

Stoner, Freeman dan Gilbert (Handoko:2002:32) berpendapat bahwa Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Schermerhorn (2002:32) pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

d. Pola Pengawasan

. Teknik pengawasan menurut Siagian (2008 : 112) adalah sebagai berikut :

1) Inspeksi langsung

Inspeksi langsung atau yang lebih dikenal dengan pengawasan langsung yaitu mengawasi secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan. Selanjutnya ada dua macam teknik yang bisa dilakukan dalam inspeksi langsung yaitu :

- a. *On The Spot Observation*, merupakan inspeksi langsung yang dilakukan dengan cara

mengobservasi kegiatan yang dilaksanakan.

- b. *On The Spot Report*, yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan yang masuk.

2) Tidak langsung

Pengawasan tidak langsung bisa pula disebut pengawasan dari jarak jauh adalah pengawasan yang dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan baik itu tertulis maupun lisan.

Jadi Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

e. Proses Pengawasan

Menurut Kadarman (2001,161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu:

- a) Menetapkan Standar

Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar.

b) Mengukur Kinerja

Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan.

c) Memperbaiki Penyimpangan

Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Langkah-langkah yang dilakukan selama proses pengawasan menurut Schermerhorn dalam Sule dan Saefullah (2006:317), antara lain:

1. Penetapan standar

Tujuan yang ingin dicapai organisasi bisnis atau perusahaan harus ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan dibuat.

2. Penilaian kinerja

Upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dalam standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Tindakan koreksi

Tindakan yang dilakukan perusahaan apabila perusahaan mengalami masalah dan mencari jawaban mengapa masalah tersebut terjadi.

f. Tujuan Pengawasan

Menurut Bohari (2002, 5) tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan kesalahan atau hambatan kepada pimpinan atau penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan yang korektif yang perlu. Sedangkan menurut Silalahi (2003:181) tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:

a. Mencegah terjadinya

penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan

b. Agar proses kerja sesuai dengan

prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan

c. Mencegah dan menghilangkan

hambatan dan kesulitan yang

akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan

- d. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya
- e. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Menurut Siagian (2002, 259) pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rancana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efesiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin.

2. Alur Pikir Penelitian

Kerangka Teori

Pelaksanaan pengawasan terhadap program keluarga harapan (PKH) didesa seranggam kecamatan selakau timur kabupaten sambas

Masalah Penelitian

- 1. Kurang efektifnya dalam penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH)
- 2. Laporan yang tidak akurat atas proses penyaluran PKH
- 3. Turun lapangan dan pelaksanaan pengurusan yang jarang dilakukan

Teori

Teknik pengawasan menurut (2008:112) adalah sebagai berikut :

- 1. Inspeksi lansung (pengawasan langsung)
 - a) On the spot observation (observasi tempat)
 - b) On the report (laporan yang masuk)
- 2. Pengawasan tidak langsung
 - a. Laporan tertulis
 - b. Laporan lisan

Output

Proses pengawasan yang efektif dalam mendukung penyaluran dana PKH yang tepat sasaran.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan yang ada dilapangan. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Moleong (2006, 18) jenis penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu keadaan, gejala atau objek tertentu pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Sedangkan Sugiyono (2011, 15) mendefinisikan metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah didesa seranggam kecamatan selakau timur kabupaten sambas

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2019 hingga Juli 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Tim Koordinasi PKH
2. Petugas Verifikasi PKH
3. Kepala desa
4. Kasi kesejahteraan social kecamatan
5. Pendamping PKH
6. Ketua RT
7. 5 orang penerima PKH
8. 5 orang tidak menerima PKH

objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) didesa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik observasi, penulis berada diantara objek penelitian untuk mengamati secara langsung fenomena maupun keadaan yang nyata yang ada dilapangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mengamati secara langsung bagaimana teknik pengawasan yang dilakukan kepala dinas sosial kabupaten sambas terhadap pendamping sosial dalam penyaluran dana PKH.

2) Teknik wawancara, penulis mengadakan wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) terhadap informan kunci sebagai sumber data. Pertanyaan yang diajukan berkaitan erat dengan bagaimana Pengawasan program keluarga harapan di Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas.

3) Teknik dokumentasi, penulis memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menggunakan alat berupa kamera. Dengan menggunakan alat dokumentasi tersebut banyak aspek pengamatan dapat di dokumentasikan dengan lebih

sempurna dan penulis dapat berulang kali mengamati dengan seksama.

5. Teknik Analisa Data

Sugiyono (2011, 364)

menyatakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap, yaitu;

1) Meringkas data (data reduction)

Data yang diperlukan dari lokasi penelitian ditulis dalam bentuk uraian dan akan terus bertambah, sehingga diperlukan reduksi data dengan menyisihkan data yang diperlukan. Disamping itu penulis melakukan kegiatan merangkum dan memilih data yang mempunyai kesamaan tema yang kemudian disusun secara sistematis sehingga memudahkan penulis.

2) Memaparkan (data display)

Penyajian yang penulis lakukan untuk mempermudah penulis melihat gambaran secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu dalam mengambil kesimpulan yang tepat. Oleh karena itu, agar data dapat dilihat secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian

ini, maka penulis menyajikan data dalam bentuk menarik bagian atau uraian naratif.

3) Menyimpulkan (verification)

Penulis berusaha mencari makna dari data yang telah diperoleh, hal ini dilakukan sejak penulis mulai memasuki lapangan dan proses pengumpulan data terus mencari pola, tema, hubungan, persamaan serta hal-hal yang sering timbul yang berhubungan dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Walaupun data yang didapat bukti-buktinya masih kurang dan masih diragukan kebenarannya. Akan tetapi melalui verifikasi dilakukan dengan mencari data baru untuk mendukung, sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih valid.

6. Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)

Triangulasi adalah teknik uji validitas dengan menggabungkan data-data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi. Untuk menghindari kesalahan antara temuan data yang dianalisis dengan data yang

sebenarnya dilapangan, maka penulis melakukan uji validitas dari data yang perlu di uji dengan uji kredibilitas data dengan melakukan triangulasi. Triangulasi terdiri dari tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

D. HASIL PENELITIAN

1. pengawasan langsung

Inspeksi langsung atau yang lebih dikenal dengan pengawasan langsung yaitu mengawasi secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan. Selanjutnya ada dua macam teknik yang bisa dilakukan dalam inspeksi langsung yaitu : *On The Spot Observation*, merupakan inspeksi langsung yang dilakukan dengan cara mengobservasi kegiatan yang dilaksanakan. *On The Spot Report*, yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan yang masuk.

Untuk mencapai tujuan organisasi, maka selayaknya sebuah organisasi harus mampu menempatkan pengawasan yang efektif dan efesiensi, jika sebuah organisasi mampu menempatkan pengawasan yang baik pada sebuah program yang memang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penyelesaian pekerjaan dan tujuan yang telah ditetapkan organisasi akan lebih mudah dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan menunjukkan bahwa Dinas Sosial dalam pengawasan langsung pada program keluarga harapan masih belum sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditentukan sebelum kegiatan berlangsung yang telah ditentukan oleh pusat. Seperti validasi data, penyaluran dana, dan lain-lain.

2. pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung bisa pula disebut pengawasan dari jarak jauh adalah pengawasan yang dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan baik itu tertulis maupun lisan.

Jadi Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Proses komunikasi merupakan

hal yang penting didalam lingkungan ekstern, komunikasi yang efektif penting untuk dipelajari karena akan sangat membantu untuk memiliki hubungan yang baik dengan yang lainnya. Tidak dapat disangkal akan pentingnya komunikasi ditempat kerja, mengingat bahwa dalam sebuah organisasi terdapat banyak orang dari berbagai latar belakang sosial dan profesional yang berbeda dan bekerja untuk tujuan yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan bahwa proses laporan yang dilakukan pendamping pkh cukup baik atau sudah optimal, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kerjasama antara pendamping pkh dengan dinas sosial serta aparatur daerah kecamatan dan desa sebagai upaya untuk meningkatkan seatu program dalam peyaluran dan validasi data. Namun laporan lisan dan tertulis ini masih baik akan tetapi dalam proses pengawasannya masih kurang teliti maupun efektif, hal tersebut dikarenakan masih banyak penerima pkhdidesa seranggam yang belum efektif dan mengerti dalam syarat penerima PKH.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya yang dapat peneliti ambil dan pembahasan tersebut adalah pengawasan terhadap program keluarga harapan di desa seranggam oleh dinas social masih belum optimal, berikut penjelasan yang telah peneliti analisis menggunakan teori dan ditarik dari beberapa kesimpulan yaitu :

a) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung yang dilakukan dinas sosial sudah cukup baik yaitu berwujud pengecekan dan pengawasan langsung dilapangan, yang diawasi adalah penerima PKH yang sudah tepat sasaran dan yang tidak tepat sasaran, teknik pengawasan langsung terdiri dari :

1. Teknik on the spot observation yang dilakukan dinas sosial sudah cukup baik, namun masih belum optimal. Cukup baik terbuhtinya dengan data yang dari 170 penerima PKH yang terdaftar ada sebagian sekitar 70 penerima PKH yang tidak tepat

sasaran jadi 50 % pengawasan berhasil merealisasikan program keluarga harapan, dan juga dengan adanya jadwal dalam melakukan pengawasan yaitu sebulan sekali, namun untuk waktunya tidak ditentukan bahkan setahun bisa 2 kali. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengawasan observation mengalami kendala yaitu masih kurangnya pengawasan program keluarga harapan dalam pemilihan maupun memverifikasi calon penerima PKH yang dilakukan oleh dinas sosial. Hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya pengawasan untuk mengawasi proses pelaksanaan program keluarga harapan yang mana dinas sosial hanya sebagai pemantau dan hanya menjadi pelaksana kegiatan proses program keluarga harapan.

2. Teknik on the spot report. Teknik on the spot report yang dilakukan oleh dinas sosial sudah dilakukan dengan baik, terbukti dengan pembuatan laporan langsung ditempat yang

dilakukan oleh kinerja pendamping PKH. Berdasarkan keterangan pendamping PKH, diketahui bahwa setelah setelah pengawasan maupun pekerjaan selesai maka setiap pengawasan wajib membuat laporan. Dalam memberikan laporan tersebut para kinerja PKH bisa menyampaikan laporannya melalui handphone agar dapat mempermudah mereka, dan terdapat grup whatsapp masing-masing dengan turut melampirkan foto keadaan dilapangan. Dalam memberikan laporan dengan teknik on the spot report ini tidak mengalami kendala

b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan dinas sosial sudah cukup baik, yaitu terwujudnya pengecekan data yang dilakukan setiap bulan turun lapangan dan setiap hari dikantor untuk mengetahui perkembangan masyarakat dalam program tersebut yang dilaksanakan oleh kinerja pendamping dalam keberhasilan

program keluarga harapan tersebut.

Pengawasan tidak langsung yaitu :

1. Teknik lisan yang dilakukan oleh dinas social kabupaten sambas sudah cukup baik. Cukup baik yaitu terbukti dengan informasi yang didapat bahwa semua kinerja pendamping wajib membuat laporan setiap turun lapangan setelah melakukan pekerjaannya. Menurut informasi peneliti dapatkan dari coordinator pendamping dalam melakukan laporan secara lisan, pendamping pkh dapat memberiksn laporan serta informasi ke atasannya melalui handphone agar lebih mudah.
2. Teknik tertulis. Teknik tertulis yang dilakukan oleh dinas social sudah cukup baik. Cukup baik yaitu terbukti dengan informasi yang didapat bahwa semua kinerja pnedamping PKH wajib membuat laporan setiap bulannya sebelum melakukan pekerjaannya. Menurut informasi peneliti dapatkan dari pendampig pkh bahwa ada keharusan

pendamping harus melaporkan hasil kerja, melapor sebelum melakukan turun lapangan dan pengawasannya kepada coordinator pendamping pkh kabupaten.

Selain itu pembinaan dan sosialisasi juga merupakan bagian dari pengawasan tidak langsung, merupakan hal yang penting untuk memberikan pemahaman kepada penerima manfaat tentang program keluarga harapan. Namun informasi yang didapat selama penelitian, kegiatan sosialisasi yang dilakukan cukup baik namun masih belum sempurna, karena masih ada penerima manfaat masih belum mengerti dengan tujuan program tersebut dan hal tersebut tidak terlepas juga dengan penerima manfaat yang masih kurangnya kesadaran diri yang tinggi dalam Peningkatan Kemampuan Keluarga.

2. Saran

Setelah mengemukakan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam tulisan ini berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi dinas sosial kabupaten sambas melaksanakan pengawasan dalam menangani

terlaksananya program keluarga harapan sebagai berikut :

a) Pengawasan langsung

1. Teknik pengamatan dilapangan (On The Spot Observation)

a. Dinas sosial kabupaten sambas untuk lebih tegas lagi dalam melakukan penindakan terhadap penerima PKH yang belum melaksanakan kebijakan program keluarga harapan. penerima lebih mengerti bagaimana kebijakan yang sudah ditentukan oleh program keluarga harapan. Karena dinas social maupun pendamping tidak tegas dalam melakukan penindakan maka penerima pkh berfikir kebijakan program tersebut tidak terlalu penting, dan kegiatan yang diberikan untuk peningkatan kemampuan keluarga kurang di tanggapi oleh penerima pkh karena tidak diberi penindakan dan sanksi dari pusat.

b. Dinas sosial lebih selektif untuk melakukan pengawasan, karena peneliti mendapatkan informasi pengawasan hanya melakukan pengecekan di aplikasi program

keluarga harapan dan media social yaitu group whatsApp saja, tidak melakukan pengawasan langsung kelapangan.

c. Diharapkan dinas sosial untuk lebih efektif dan teliti dalam pengawasan agar tercapainya tujuan program keluarga harapan ini untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

2. Teknik laporan di tempat (on the spot report)

Diharapkan dinas social untuk lebih meningkatkan lagi system informasi dan system komunikasi kepada pendamping pkh, kecamatan dan desa akan system pengawasan berjalan dengan lebih baik.

b) Pengawasan tidak langsung

1. Diharapkan dinas sosial dan pendamping pkh lebih efektif dan teliti dalam upaya mengoptimalkn pengawasan yang dilakukan dan bentuk upaya lainnya dalam menghadapi kendala yang ada seperti dalam merealisasikan seluruh rencana kegiatan atau proses berlangsungnya Program Keluarga Harapan tersebut.

2. Penerima manfaat agar lebih meningkatkan kewajiban-kewajiban kegiatan program PKH dan mengoptimalkan peran sebagai penerima manfaat dalam mengembangkan dana bantuan agar program tersebut tidak menjadi candu bagi penerima khususnya terpacu kepada kesadaran diri sendiri.

F. REFERENSI

Sumber Buku :

- Bohari. 2002. *Pengawasan Keuangan Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ernie, Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Prenada Media.
- _____. 2006. *Pengantar Manajemen (Edisi Pertama)*. Jakarta: Prenada Media.
- Faisal, Sanapiah. 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Handoko, T Hani. 2002. *Manajemen Personalia & Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta : BPFE.
- _____. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasbuan. 2005. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2005. *Manajemen Sumberdaya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta. Pustaka Quantum.
- Manullang. 2002. *Dasar-dasar manajemen*. Yogyakarta: Gadhah Mada University Pers.
- Meleog, J. Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruz Media
- Keban. 2004. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik*. Surabaya: Widyaaiswara.
- _____. 2004. *Enam Dimensi Strategi Admiistrasi Pulik Kosep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Safroni. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Sagian, Sondang .P. 2003. *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT. renika cipta.
- _____. 2008. *Pengantar Manajemen, Edisi Pertama*. Jakarta : Bumi Aksara.
- _____. 1990. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung : Alfabeta
- _____. 2008. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2008. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- _____. 2002. *Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Cetakan

- pertama*. Jakarta: PT. Renika cipta.
- _____. 2003. *Teori Dan Praktek Kepemimpinan (Cetakan Kedua)*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Sarwoto. 2001. *Dasar-dasar Organisasi an Manajemen. Cetakan keenam belas*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Simamora, Hendry. 2012. *Sumberdaya Manusia*. Edisi 1. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.
- Sumarsono, sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: GrahaIlmu.
- Sukarna.2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Madar Maju.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung:PT. Remaja rosdakarya.
- _____. 2009. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Terry, George. 1964. *Manajemen Dan Reformasi Pelayanan Publik*. Surabaya :Widyaiswara.
- Ulber, Silalahi. 2003. *Tentang Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Web :**
[http://pancawangi.sideka.id/2019/01/12/apa-tujuan-dan-siapa-penerima-manfaat-program-keluarga-harapan-pkh/ 2 september 2019](http://pancawangi.sideka.id/2019/01/12/apa-tujuan-dan-siapa-penerima-manfaat-program-keluarga-harapan-pkh/2-september-2019)
[https://www.jogloabang.com/komunitas/permensos-no-1-tahun-2018-tentang-program-keluarga-harapan/ 19 september 2019](https://www.jogloabang.com/komunitas/permensos-no-1-tahun-2018-tentang-program-keluarga-harapan/19-september-2019)

Peraturan :